

## Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Mengatasi Kemiskinan

Yuliyantini

Universitas Langlangbuana

---

### Article Info

Received : 23 Juni 2023

Publish : 09 July 2023

---

### Keywords

Local Government

Poverty

Pangandaran

---

### Info Artikel

Received : 23 Juni 2023

Publish : 09 Juli 2023

---

### Abstrack

*The Poverty is still a problem for all regions in Indonesia including Pangandaran Regency which is a new autonomous region in West Java. The purpose of this study was to find out how the efforts made by the regional government of Pangandaran Regency to deal with the poor and how the results of the local government's role in dealing with the poor in Pangandaran Regency. The research method used is a qualitative descriptive method by researching and describing poverty in Pangandaran Regency in 2021 and 2022. The results of the research show that poverty in Pangandaran Regency has decreased, from 9.65 percent in 2021 to 9.32 percent only in 2022 or a decrease of around 0.33 percent, which means around 1,083 people are free from poverty in Pangandaran Regency. This is inseparable from the efforts made by Pangandaran Regency in the form of Providing Direct Assistance, Improving the Quality of Education, Development of New Tourist Destinations, Improving Facilities and Health Insurance, Development of Infrastructure Facilities, Development of Settlements.*

---

### Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah untuk semua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonom baru di Jawa Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk menangani masyarakat miskin dan bagaimana hasil dari peran pemerintah daerah untuk menangani masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan meneliti dan mendeskripsikan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 serta tahun 2022. Hasil penelitian mengemukakan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran turun, yang semula pada tahun 2021 sebesar 9,65 persen menjadi 9,32 persen saja di tahun 2022 atau turun sekitar 0,33 persen yang berarti sekitar 1.083 jiwa terbebas dari kemiskinan di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukan Kabupaten Pangandaran berupa Pemberian Bantuan Langsung, Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembangunan Destinasi Wisata Baru, Peningkatan Fasilitas dan Jaminan Kesehatan, Pembangunan Sarana Prasarana, Pembangunan Pemukiman.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author

Yuliyantini

Universitas Langlangbuana

Email : [yuliyantini@unla.ac.id](mailto:yuliyantini@unla.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan umum di berbagai negara berkembang di dunia dan tidak terkecuali Indonesia, yang mana permasalahan kemiskinan ini harus segera ditangani dalam menunjang perekonomian yang kuat. Menurut Todaro (2006) pengentasan kemiskinan merupakan salah satu unsur dalam proses multidimensional pembangunan perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut kemiskinan memiliki arti yang luas seiring dengan kompleksnya faktor penyebab dan permasalahan lain yang melibatkan seluruh aspek, maka kemiskinan ini sendiri berarti ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup (Kuncoro, 2010). Penyebab kemiskinan yang dilihat dari segi ekonomi; Pertama, kemiskinan pada tingkat mikro disebabkan oleh ketidakmerataan kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan

muncul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses permodalan. Secara spesifik, kemiskinan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Studi menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya modal, kurangnya kesempatan kerja, pendidikan yang rendah, kurangnya semangat bekerja, dan beban keluarga (Marinda, 2017).

Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi saja, namun juga menjadi permasalahan sosial yang serius, pasalnya lingkungan keluarga menciptakan sebuah siklus yang membuat kemiskinan ini terus berlanjut dari generasi ke generasi, hak demikian kerap disebut dengan lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle of poverty* (Sukirno, 2010). Dengan demikian mengentaskan kemiskinan juga menjadi misi Indonesia yang tertuang dalam Ideologi untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Saifudin, 2014). Dalam mewujudkan tujuan mulia ideologi tersebut, maka pemerintah Indonesia kemudian membuat dan mempedomani undang-undang khusus tentang penanganan masyarakat miskin yang tertuang pada undang-undang no.13 tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, namun tugas dari pemerintah daerah juga. Pada pasal 31 disebutkan dan dijelaskan tentang penanganan fakir miskin bahwa penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- 2) Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) Evaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- 6) Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Apabila melihat tugas-tugas dari pemerintah daerah dalam menangani masyarakat miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa pokok yang diatur dalam Undang-Undang no.13 tahun 2011 antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Pemerintah daerah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena negara berkomitmen untuk memberdayakan seluruh warga negaranya dari kondisi kekurangan atau kemiskinan sesuai dengan yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang no.13 tahun 2011.

Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Kabupaten Pangandaran termasuk daerah pesisir, karena dekatnya daerah ini dengan pantai atau lautan. Kabupaten Pangandaran mempunyai keuntug di bidang pariwisata. Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata dan perikanan maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama”.

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru di Jawa Barat yang baru saja genap satu dekade. Kabupaten Pangandaran sangat rentan terhadap kemiskinan, pasalnya masih banyak sumber daya dan sektor perekonomian yang masih belum maksimal, yang terbukti dari pendapatan perkapita

Kabupaten Pangandaran yang masih rendah. Selain daripada itu kurangnya kualitas aparatur sipil di Kabupaten Pangandaran dapat membuat jaminan sosial untuk masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Jumlah penduduk yang tercatat menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 sebanyak 423.670 jiwa, namun penduduk yang produktif (usia 20-39) sangatlah minim yaitu sekitar 11,67 persen saja. Tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Pangandaran ini juga tergolong rendah dikarenakan hampir separuh dari jumlah penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar saja. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila pada saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran cukup tinggi yaitu sebesar 9,32 persen di tahun 2022.

Maka disinilah peran pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai pengarah dan pembuat kebijakan daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Faturahman et. al (2021) peran pemerintah yang baik terhadap masyarakatnya dimana pemerintah harus bisa memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan melalui Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana dalam pembangunan. Lebih jauh dari itu Marthalina (2018) disebutkan bahwa peran fungsi dari pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan Produk Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian diharapkan pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat menjadi penggerak dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian di daerah, sehingga kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dapat dientaskan.

Melalui ulasan atas paparan diatas, terdapat sebuah peran penting pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengentaskan Kemiskinan. Maka dalam penelitian ini dapat disusun rumusan masalah, yang mana akan menjadi tujuan peneliti dalam pengamatan ini, yaitu :

- 1) Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk menangani masyarakat miskin; dan
- 2) Bagaimana hasil dari peran pemerintah daerah untuk menangani masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran.

## 2. METODE

Metode penelitian yaitu merupakan satu cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan memiliki kegunaan tertentu. Dijelaskan dalam Silalahi (2012) desain penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang telah disusun dengan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Maka tujuan umum yang dibuat dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan dibuat dengan langkah-langkah yang relevan dengan masalah (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini digunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, dimana penelitian ini mengamati terhadap perubahan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap kemiskinan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran secara akurat, faktual, serta sistematis tentang peran pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Sugiyono (2014) dalam model penelitian ini secara khusus peneliti adalah menjabarkan hasil pengamatan kedalam sebuah narasi ataupun pada sebuah gambaran.

Pada penelitian ini akan dititikberatkan kepada desain penelitian dengan dimensi waktu dengan menggunakan data sekunder secara berkala. Data yang didapatkan bersumber dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pangandaran pada rentan waktu 2021 dan 2022. Metode yang selanjutnya yakni peneliti menggunakan metode observasi, studi kepustakaan guna mendukung penelitian ini, yang bersumber dari publikasi yang diterbitkan dari portal resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Dimana data yang didapatkan tersebut selanjutnya akan dianalisa serta akan disajikan dalam suatu tulisan yang utuh

## 3. PEMBAHASAN

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tugas besar bagi pemerintah untuk terus meminimalisir tingkat kemiskinan di seluruh daerah. Khususnya di Kabupaten

Pangandaran, tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di daerah kabupaten pangandaran pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2021. Hal ini menjadi suatu keberhasilan untuk pemerintah daerah pangandaran untuk menangani masyarakat miskin di daerahnya. Dalam mengukur masyarakat miskin, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Masyarakat yang dikategorikan sebagai Masyarakat miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran memperlihatkan pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin mencapai 40.140 jiwa, atau setara dengan 10,23 persen. Namun, pada tahun 2017, jumlah orang miskin menurun menjadi 39.460 jiwa, atau setara dengan 10,00 persen. Pada tahun 2018 angka kemiskinan menjadi 32.190 jiwa atau menempati angka 8,12 persen. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Pangandaran sebanyak 30.730 jiwa atau menempati angka 7,71 persen. Hasil penurunan angka kemiskinan di kabupaten pangandaran menjadi hak yang positif bagi pemerintah setempat, karena berhasil menekan angka masyarakat miskin bagi daerah kabupaten pangandaran khususnya.

Meskipun pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran mencatat jumlah penduduk miskin lebih rendah dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2019 ke 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan, pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran mencapai 36.050 jiwa atau 8,99 persen. Bukan tanpa alasan jika tingkat kemiskinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh dunia semua negara mengalami kesulitan karena krisis ekonomi yang melanda, dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang berdampak juga pada ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2021 juga kembali terulang diaman jumlah masyarakat miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 39.070 jiwa atau 9,65 persen. Hal ini karena wabah Covid-19 masih belum usai di Indonesia. Namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan atau jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan, tercatat oleh BPS Kabupaten Pangandaran 9,32 persen. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi Masyarakat miskin sesuai dengan UU No.13 tahun 2011.

Meskipun Kabupaten Pangandaran memiliki keunggulan komparatif di sektor pariwisata serta hasil laut, namun secara nyata masih banyak penduduk di Kabupaten Pangandaran yang berada dalam kemiskinan, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran terhitung banyak jika dilihat dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik diatas. Maka hal ini menjadi sebuah tugas penting yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di daerahnya.

#### **a. Usaha Pemerintah Daerah Pangandaran untuk Mengatasi Masyarakat Miskin**

Stiap pemerintah daerah tentunya berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai usaha yang maskimal. Menurut Sunarno (2006) untuk mengatasi kemiskinan hal yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah adalah rencana dan strategi yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung, yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, seperti pemberian bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial berupa sembako. Sedangkan kebijakan tidak langsung berupa pemberian jaminan sosial atau jaminan pendidikan bagi masyarakat. Walaupun telah dilakukan berbagai usaha namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya di kabupaten pangandaran.

Program mengatasi masyarakat miskin harus dilakukan secara terpadu, bukan saja pada proses perencanaan tetapi pada sasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing

wilayah tersebut. Berikut usaha pemerintah daerah Pangandaran untuk mengatasi masyarakat miskin sesuai peraturan Bupati Pangandaran tentang penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pangandaran:

#### 1.) **Pemberian Bantuan Langsung**

Usaha pemerintah daerah pangandaran untuk mengatasi masyarakat miskin salah satunya dengan adanya BLT, Pemerintah membuat regulasi pemulihan ekonomi masyarakat dari APBN melalui pengelolaan dana desa yang tertuang dalam PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kabid Pemerintahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Pangandaran, Yayat Ahdiat, menguraikan bahwa PMK nomor 190 merupakan pelaksanaan peraturan Presiden (Perpres) 104 tahun 2021. Minimal 40 persen dari dana desa yang berasal dari APBD akan diperuntukkan untuk bantuan sosial. Sementara itu 20 persen akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Untuk penanganan pandemi Covid-19, sekitar 8 persen dari dana tersebut akan digunakan. Sisanya, yaitu 32 persen, akan dialokasikan untuk program-program pemerintah daerah.

Pemerintah kabupaten pangandaran menyatakan bahwa penerima bantuan sosial akan menerima sekitar Rp 300 ribu per bulan. Pencairan dana desa akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu 7 bulan untuk tahap pertama dan 5 bulan untuk tahap kedua bagi desa mandiri. Sementara itu, desa reguler akan mendapatkan pencairan dalam tiga tahap, yaitu 5 bulan untuk tahap pertama dan kedua, serta 2 bulan untuk tahap ketiga. Dana Desa yang bersumber dari APBN di kabupaten Pangandaran tahun 2022 sebesar Rp 86 miliar untuk 93 Desa, angka tersebut ada penurunan sekitar 5 miliar dari tahun 2021 yaitu 90 miliar.

#### 2.) **Peningkatan Mutu Pendidikan**

Adapun usaha pemerintah daerah pangandaran dalam bidang Pendidikan yaitu penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa, bantuan honor pengajar, pakaian, seragam, operasional, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah pangandaran juga gencar membangun beberapa pendidikan lain seperti SD, SMP, SMA/MA/SMK bahkan perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang akan realisasikan tahun 2023 mendatang adalah Universitas LanglangBuana.

#### 3.) **Pembangunan Destinasi Wisata Baru**

Pembangunan beberapa objek wisata juga menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masyarakat miskin disana, karena Kabupaten Pangandaran yang terkenal dengan keindahan pantainya membuat Pemerintah setempat memanfaatkan hal itu untuk membangun objek wisata baru, otomatis membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pangandaran dan mengurangi angka kemiskinan. Salah satu objek wisata baru di Pangandaran adalah Aquarium Indonesia Pangandaran, sebelumnya dikenal sebagai Piamari Aquarium. Destinasi wisata ini resmi dibuka pada tanggal 17 Desember 2022.

#### 4.) **Peningkatan Jaminan dan Fasilitas Kesehatan**

Pembangunan RSUD PANDEGA (Pangandaran Sehat dan Bahagia) menjadi salah satu usaha pemerintah daerah Pangandaran untuk menangani permasalahan kemiskinan disana. RSUD PANDEGA dibangun dengan batu pertama pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2020. Menghabiskan dana mendekati angka Rp. 400 miliar dari APBD Kabupaten Pangandaran, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan fisik, dan yang paling banyak dari Provinsi Jawa Barat. Bupati Pangandaran yaitu Jeje Wiradinata mengatakan jika pemerintah setempat akan menggolontorkan dana guna membantu masyarakat miskin yang berobat dari APBD Kab. Pangandaran dengan nominal 2,5 miliar.

#### 5.) **Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Kabupaten pangandaran banyak membangun infrastruktur baru dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Missal adanya pembangunan jembatan yang dilakukan oleh pemerintah Pangandaran, pembangunan ini tidak hanya mendukung

perkembangan sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Pangandaran, tetapi juga dapat memfasilitasi kemudahan akses dan pergerakan masyarakat antar wilayah. Pemerintah kabupaten Pangandaran telah berusaha keras untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun beberapa jembatan, salah satunya adalah Jembatan Sintok yang menghubungkan Desa Pagergunung di Kecamatan Pangandaran dengan Desa Ciparakan di Kecamatan Kalipucang.

#### **6.) Pembangunan Pemukiman**

Pembangunan bidang Kawasan umum adalah pembangunan atau usaha pemerintah Pangandaran untuk memfasilitasi dan membuat kenyamanan masyarakat di kawasan pedesaan, pembangunan itu terdiri dari jalan desa, jalan permukiman/ gang, jembatan di perkampungan, pembuatan sumber air bersih (sumur) hingga pembangunan MCK. Adapun usaha pemerintah daerah pangandaran untuk mengatasi masyarakat miskin secara tidak langsung, yaitu:

- a) Pembinaan kepada masyarakat mengenai Kesehatan, Pendidikan
- b) Pembinaan Lembaga Adat 3
- c) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- d) Pembinaan PKK
- e) Pembinaan Nelayan
- f) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

#### **b. Hasil Usaha Pemerintah Daerah Pangandaran dalam Mengatasi Kemiskinan**

Beberapa usaha atau program yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, memiliki hasil yang bisa dikatakan cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu bukti dari keberhasilan tersebut adalah data masyarakat miskin yang tercatat Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Pangandaran pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 9,65 persen pada tahun 2021 menjadi 9,32 persen pada tahun 2022. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan sekitar 0.33 persen atau sekitar 1.083 jiwa.

Dengan program-program yang mendukung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangandaran yang mencakup kepada peningkatan daya beli, peningkatan lama sekolah, dan peningkatan harapan hidup. Dimana hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meriyanti (2015) dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut Kuncoro (2010) menegaskan bahwa untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan perlu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu dengan peningkatan pendapatan, pendidikan masyarakat yang tinggi, dan kesehatan dari masyarakat daerah tersebut.

Hal serupa juga mempunyai pengaruh yang sama antara pengembangan pariwisata dengan pengentasan kemiskinan, dimana pariwisata dapat menarik sektor ekonomi lain untuk maju sehingga kemiskinan dapat dikurangi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitiannya Tyas dan Asnawi (2014) menemukan bahwa dengan pembentukan desa wisata dapat merubah jumlah pada keluarga dengan golongan pra sejahtera dan sejahtera I menjadi lebih baik lagi perekonomiannya. Ismayanti (2010) menegaskan bahwa pariwisata merupakan kunci untuk meningkatkan perekonomian daerah, dimana pariwisata bagaikan lokomotif ekonomi yang menghasilkan spread effect pada sektor perekonomian lain.

Jika dilihat dari sedikitnya angka turunnya kemiskinan di daerah Pangandaran, maka pemerintah kabupaten Pangandaran perlu mempertajam program-program yang terkaji, caranya bisa dilakukan dengan mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan dan memperhatikan kelemahan serta kelebihanannya. Sunarno (2006) menjelaskan bahwa program harus dimulai dengan menargetkan penanggulangan kemiskinan. Sasaran program sebaiknya ditujukan pada dua kelompok, yaitu masyarakat yang sangat miskin atau tidak dapat bekerja lagi (poor of

poor) dan masyarakat yang miskin namun masih produktif. Untuk kelompok pertama, diperlukan bantuan sosial untuk membantu mereka bangkit. Sedangkan untuk kelompok kedua, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi sebesar 9,65 persen di tahun 2021 telah melakukan berbagai macam usaha untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Usaha yang telah dilakukan adalah Pemberian Bantuan Langsung, Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembangunan Destinasi Wisata Baru, Peningkatan Fasilitas dan Jaminan Kesehatan, Pembangunan Sarana Prasarana, Pembangunan Pemukiman;
- b. Kemudian setelah usaha yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran tersebut diatas membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangandaran turun, yang semula pada tahun 2021 sebesar 9,65 persen menjadi 9,32 persen saja di tahun 2022 atau turun sekitar 0,33 persen yang berarti sekitar 1.083 jiwa terbebas dari kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Pangandaran. 2023. *Kabupaten Pangandaran dalam Angka Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Press: Pangandaran.
- Faturahman, Muhammad Farhan, Usep Dayat, dan Rachmat Ramdhani. 2021. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 8(1).
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar Ekonomika Pembangunan*. UPP Stim YKPN: Yogyakarta
- Marinda, Anna N. I. 2017. The Analysis of the Economic Growth, Minimum Wage, and Unemployment Rate to the Proverty Level in East Java 2012-2014. *International Journal of Economic Research*. 14(13)
- Marthalina. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tanggeran Provinsi Banten. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*. 10(1).
- Meriyanti, Ni Komang. 2015. Pengaruh Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2014. *Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 3(1)
- Saifudin, Achmad Fedyani. 2014. *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan*. Kertas kerja dalam Lokakarya. GAPRI: Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar edisi ke tiga*. PT Raja Grasindo Perseda: Jakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Todaro, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 edisi 9*. Erlangga: Jakarta.
- Tyas, Ninik Wahyuning, dan Asnawi. 2014. Kinerja Pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Selemang. *Jurnal Teknik PWK*.3(4).